

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DI
LAKUKAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA
(Studi Kasus Di Kota Makassar)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. IBNU TUPAIL ISKANDAR

NIM: 10100114141

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas *Rahmat, Hidayah, Inayah* dan *Taufik* yang senantiasa dicurahkan kepada penulis, sehingga segala bentuk rintangan dan tantangan dapat terlewati. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, sebagai satu-satunya *uswah* dan *qudwah*, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Emran Iskandar dan Ibunda Marselina serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Supardin. M.Hi. dan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar.
4. Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag dan Drs. H. Jamal jamil, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam menyusun skripsi ini dan membimbing penulis sampai tahap penyelesaian.

5. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Dan yang terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Emran Iskandar dan Ibunda Marselina sebagai ungkapan terima kasih tak terhingga karena telah membesarkan dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan semangat kepada penulis dan juga memberikan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Kepada kakanda-kakanda dan adinda-adinda diprodi Peradilan Agama, terutama angkatan 2014 atas keikhlasan dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan dibangku kuliah, semoga rasa solidaritas kita jangan sampai terlupakan.

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, tapi juga untuk masyarakat luas.

Samata, juli 2018
Penulis

Muh. Ibnu Tupail Iskandar
NIM: 10100114141



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii-xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Kajian Pustaka.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7-29
A. Pengerian Advokat.....	7
B. Pengertian Kejahatan	33
C. Ruang Lingkup Advokat Terhadap Klien.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	47-48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49-63

- A. Sejarah Advokat di Indonesia 49
- B. Bentuk Kejahatan Yang di Lakukan Advokat terhadap kliennya 55
- C. Upaya yang di Lakukan A.A.I Untuk Menertibkan Anggotanya Agar
Tidak Melakukan Pelanggaran Kode Etik 56

BAB V PENUTUP.....65-66

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	Y	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup (*Ta'marbutah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". *ta'marbutah* yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda *Syaddah* atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "I" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللّٰهُمَّ دِينُ اللَّهِ *billah*

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh:

Syahrul ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Wa ma Muhammadun illa rasul

ABSTRAK

NAMA : MUH. IBNU TUPAIL ISKANDAR
NIM : 101001141
**JUDUL : TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN
YANG DI LAKUKAN ADVOKAT TERHADAP KLIENYA
(Studi Kasus di Kota Makassar)**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya. dan upaya yang dilakukan oleh A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) untuk menertibkan advokat yang tergabung dalam organisasinya, agar tidak melakukan kejahatan terhadap kliennya.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya adalah kebanyakan tindak pidana yang ada dalam pasal 372 yaitu tindak pidana penggelapan dan pasal 378 yaitu tindak pidana penipuan. Hal itu dilakukan oleh advokat terhadap kliennya atas dorongan dari keluarga, teman, dan kolega lainnya. Upaya yang dilakukan dalam hal menangani tindak pidana advokat terhadap kliennya adalah dengan cara membentuk suatu dewan kehormatan advokat yang anggotanya terdiri dari masing-masing perwakilan organisasi advokat dan menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan kode etik advokat indonesia dan dewan kehormatan harus berani menjatuhkan sanksi berat bagi pelaku sehingga bisa menjadi efek jera bagi advokat lainnya.

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Agar tidak terjadi pelanggaran kode etik advokat tentunya dewan perwakilan harus pro-aktif dalam menanggulangi persoalan pelanggaran yang terjadi, kurangnya aduan ke dewan perwakilan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik cumin pengadunya tidak tahu harus mengadukan kemana. 2) Keberanian dewan kehormatan dalam menjatuhkan sanksi juga merupakan faktor yang membantu agar banyak advokat mematuhi kode etik advokat Indonesia, selama ini tidak pernah ada penjatuhan sanksi yang berat dan berdampak signifikan dalam penegakan kode etik ini juga menjadi penghambat agar kode etik dihormati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum Kliennya di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik Advokat, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan (Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia).

Sejalan dengan ketentuan tersebut yang terdapat dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia di dalamnya mengatur hubungan antara Advokat dengan klien antara lain sebagai berikut:

“Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, advokat tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, hak retensi Advokat terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan Klien.”¹

Saat seorang advokat bekerja, tentu banyak godaan yang datang apalagi profesi ini selain membutuhkan biaya, juga banyak persoalan administratif yang merupakan kendala tersendiri bagi penyelesaian perkara yang sementara

¹Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat* (Cet. I; Bandung: Yrama Widya, 2016), h.12.

ditanganinya, misalnya kekurangan biaya untuk panggilan sidang, kekurangan biaya untuk melakukan sita jaminan atas sebuah objek sengketa, kekurangan biaya peninjauan setempat (*plaats onder zoek*), biaya eksekusi terhadap pelaksanaan putusan hakim dan biaya-biaya lain yang timbul misalnya biaya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang jumlahnya tidak sedikit.

Seorang advokat tidak bisa fokus kepada satu kasus saja. Di sebuah kantor advokat perkara-perkara datang silih berganti dan semuanya menuntut profesionalisme advokat tersebut dalam menangani kasus sang klien. Apabila kasus tersebut terhambat karena masalah administrasi di pengadilan, sudah pasti kasus-kasus lain advokat tersebut terhambat, makanya tentu ada godaan untuk mencari celah agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.

Seorang advokat juga bisa tergoda dengan uang titipan, misalnya seorang klien menitipkan uang perkara kepada advokat tersebut karena tidak tahu cara membayar uang untuk naik banding misalnya, bisa saja advokat tersebut merasa sedang sangat butuh uang karena ada uang yang berada dalam kekuasaannya maka oknum Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.

Banyak godaan yang dihadapi seorang advokat dalam profesinya yang terhormat ini, dan faktor-faktor penyebabnya juga variatif, bisa karena faktor sosial, faktor psikologis, dan eksploitatif sehingga menodai profesi yang bersifat *officium nobile* ini.

Apakah yang mendorong sehingga advokat tega melakukan perbuatan-perbuatan tercela ini? padahal sudah ada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik Advokat yang mengatur tentang tingkah laku advokat dalam menjalankan profesinya ini.

Melakukan pekerjaan Advokat itu adalah sebuah amanah, dimana Klien mempercayakan amanahnya kepada Advokat untuk dapat menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya oleh karena itu seorang advokat harus bisa menjaga amanah yang dipercayakan oleh klien kepada Advokat yang sudah diberi kuasa untuk mengurus perkara si Klien itu.

Ayat tentang amanah yang terdapat dalam surat annisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahanya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat tentang amanah yang terdapat dalam surat al-ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

Terjemahanya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,

Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat di iklankan maka tentunya Klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang advokat bakal menceritakan kepada orang-orang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan setelah menggunakan jasa sebagai seorang advokat.

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi celah bagi Advokat untuk berbuat curang terhadap Kliennya, oleh karena itu di dalam Kode Etik Advokat hal-hal tersebut diatur pada Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.

Seorang individu, dapat diangkat menjadi seorang Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana salah satu syaratnya ialah:

“Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.”²

Tetapi mengapa masih saja ada seorang Advokat yang tega melanggar kode etik? sedangkan mereka terdidik untuk mengikuti aturan perundang-undangan secara normatif.

Dalam kehidupan sehari-hari, memang tidak mudah untuk memenuhi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, uang listrik yang harus dibayar agar bisa terus menjalankan komputer, uang air agar bisa minum dan mandi, uang bensin agar kendaraan bisa dipakai bekerja, belum lagi biaya makan dan sekolah anaknya, semua membutuhkan biaya, hal-hal seperti ini bisa

²Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 6.

membuat seorang Advokat nekat melakukan apa yang secara moral salah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum Advokat terhadap Kliennya dengan judul **Tinjauan Sosio Yuridis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Advokat terhadap Kliennya (Studi Kasus di Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok skripsi ini adalah bagaimana tinjauan sosio yuridis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya. Adapun sub masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan advokat terhadap kliennya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) untuk menertibkan anggotanya agar tidak melakukan kejahatan terhadap kliennya?

C. Kajian Pustaka

1. Nasrudin, dalam “Penggunaan Jasa Advokat Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun penelitian ini jauh lebih mengarah kepada penggunaan jasa advocat dalam persidangan.³
2. Skripsi Aftul Munawar yang berjudul “Kode Etik Profesi Advokat Dalam

³Nasrudin, “penggunaan jasa Advokat Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), h.5.

Perspektif Hukum Islam”.Mengungkapkan dua hal kode etik advokad, yaitu kode etik advokad yang mengandung nilai moral yang mendasari diri pribadi advokad, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan, dan kejujuran, dan nilai-nilai kode etik advokad di tinjau dari hukum Islam.Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar, yaitu Tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.Adannya oknum yang melakukan praktek kurang terpuji dikarenakan lemahnya integritas pribadi advokad.⁴

3. Buku yang disusun oleh tim “Permata Press” yang berjudul *kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Buku ini menjelaskan tentang UU RI Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokad. Menurut saya buku ini sangat membantu dalam menyusun skripsi karena pembahasan Undang-Undang disertai dengan penjelasannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan oleh advokat terhadap

⁴Aftul Munawar, “Kode Etik Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam”(Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2004),h.14.

klienya.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh A.A.I untuk menertibkan advokat yang tergabung dalam organisasinya, agar tidak melakukan kejahatan terhadap klienya.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk:

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui secara sosio-yuridis, kenapa seorang Advokat melakukan kejahatan terhadap klienya.
- b. Sebagai tambahan wawasan terhadap ilmu hukum tentang kejahatanAdvokat.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk perkembangan Ilmu Hukum yang menyangkut dengan persoalan kejahatan dalam profesi Advokat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Frans Hendra Winarta: “*Advocaat*” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Advocare*” yang berarti “*to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant*”. Sedang dalam bahasa Inggris “*Advocate*” berarti: “*to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*”¹

Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.³⁴ Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Perkataan Advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis “Advokat”.

Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka 1976 disebutkan: “Advokat adalah Pengacara atau ahli

¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 72.

²Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat* (Cet. I; Bandung: Yrama Widya, 2016), h. 4.

hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan”.³

Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan “*advocato*”, “*attorney*”, “*rechtsanwalt*”, “*barrister*”, “*procureurs*”, “*advocaat*”, “*abogado*” dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Kata advokat berasal dari bahasa Latin, “*advocare*”, yang berarti “*to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*.”⁴

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

1. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”⁵

Pengertian lainnya yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia yaitu:

1. “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat,

³W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 7.

⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2.

⁵Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 4.

Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.

2. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.”⁶

Undang-Undang Advokat membedakan antara Advokat Indonesia dan Advokat asing, dimana yang dimaksud dengan Advokat Indonesia adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek atau pun sebagai Konsultan Hukum.⁷ Advokat asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/ atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.⁸

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip “*equality before the law*” dan “*acces to legal counsel*”, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Pasal 1 Ayat (9):

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat

⁶Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 4.

⁷Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 4.

⁸Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 5.

secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.”⁹

Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat. Kelemahan ini jelas hanya mempunyai sanksi administratif saja dan tidak memiliki sanksi yuridis yang lebih berat bagi Advokat. Dengan kelemahan ini, maka banyak Advokat yang melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya.

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 dan Pasal 69-74 mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau pidana) (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).

Kewajiban secara harfiah dalam Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan kewajiban dari kata “wajib” berasal dari kata “oblige” mempunyai arti mewajibkan; mengikat; mengharuskan, “due” mempunyai arti kewajiban; keharusan, dan “necessary” mempunyai arti

⁹Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 5.

memaksa; perlu; sesuatu yang memaksa.¹⁰

Berdasarkan arti di atas maka dapat disimpulkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan, tidak boleh tidak melakukan/ memenuhi, sudah sepatutnya. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik profesi Advokat, dikenal adanya “*normative ethic*” yang terkandung ketentuan-ketentuan seperti:

1. Kewajiban pada diri sendiri;
2. Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum;
3. Ketentuan-ketentuan tentang partnership;
4. Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani.¹¹

Kewajiban yang terletak berdasarkan kaidah/ norma hukum disebut kewajiban yuridis. Kewajiban yuridis yang menyatakan keharusan eksternal karena adanya hukum yang diberlakukan dan dipaksakan oleh pemerintah dan kewajiban yang menyentuh keharusan internal karena adanya kesadaran batin, sebagai suatu dorongan batin yang tak mungkin dihindari.¹²

Tugas merupakan kewajiban, wajib adalah sesuatu yang dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Pengertian beban disini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya.

Kewajiban melahirkan suatu tanggung jawab atau responsibilitas

¹⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 713.

¹¹ E. Sumaryono, *Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 16.

¹² E. Sumaryono, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 46.

(*responsibility*). Tanggung jawab dengan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹³ Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu telah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum.¹⁴

Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/ kliennya.¹⁵ Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang oleh para Advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu:

1. Kepribadian Advokat: yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 2):

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 49.

¹⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, h. 50.

¹⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 84.

menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.”¹⁶

Tidak boleh bersikap diskriminatif (Pasal 3 (a)):

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hatinuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.”¹⁷

Advokat/ Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.¹⁸

2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya (Pasal 4 (d),(f)):

“Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.”¹⁹

“Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.”²⁰

Tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 (e)):

“Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang

¹⁶Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 5.

¹⁷Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 5.

¹⁸E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 237.

¹⁹Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 6.

²⁰Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 7.

tidak perlu.”²¹

Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya.²²

3. Hubungan dengan teman sejawat: Advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 (d)):

“Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.”²³

Antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.²⁴

4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/ di luar siding meskipun hanya bersifat ”ad informandum” (Pasal 7 (c)):

“Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ”ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.”²⁵

Dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 7 (e)):

“Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-

²¹Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 7.

²²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, h. 238.

²³Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 7.

²⁴E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, h. 239.

²⁵Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 8.

saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.”²⁶

Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembeaan suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang ditanganinya.²⁷

5. Ketentuan-ketentuan lain: seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 (b),(f)):

“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/ atau bentuk yang berlebih lebihan.”²⁸

“Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan setiap Advokat.”²⁹

6. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat.

²⁶Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 8.

²⁷Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 208.

²⁸Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 8.

²⁹Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 8.

Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain:

- a. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar;
- b. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak diperintahkan/ disetujui klien-Advokat;
- c. Advokat tidak boleh memindahkan/ menggunakan Advokat pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien Advokat;
- d. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap dengan konsekuensi pembayaran jasa/ bantuan hokum sesuai kasus yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien-Advokat.

Presepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan Advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, tugas Advokat adalah:

1. Membela kepentingan masyarakat (*publik defender*) dan kliennya.
2. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.
3. Dalam menjalankan tugasnya, selain harus disumpah terlebih dahulu

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

4. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan moral dan sesuai undang-undang Advokat.

2. Fungsi dan Peranan Advokat

Peran advokat tidak akan lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.³⁰

Profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yaitu UU Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Advokat adalah profesi yang bebas (*free profession*) yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau *order* atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik

³⁰ Kelik Pramudy dan Ananto Widiatmoko, h. 96-97.

yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik, seperti notaris yang merupakan jabatan publik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.³¹

Advokat memiliki banyak peranan dalam hukum, seperti:

a. Peran advokat sebagai penegak hukum

Advokat itu berperan dalam mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus, mendorong yang tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan maupun ketertiban umum dan mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum dikarenakan salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila advokat berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “*clemency*” atau sekedar memohon keadilan.³²

b. Peran advokat sebagai pengawas penegakan hukum

Advokat itu berperan melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum. Pengawasan ini dijalankan oleh perhimpunan advokat yang mencakup dua hal, yaitu:

- 1) Internal, secara internal peran perhimpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara- cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-

³¹Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 37.

³²Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* dalam Majalah Hukum No. 240 September 2005 (Jakarta: IKAHI, 2005)

aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar.

- 2) Eksternal, secara eksternal baik perhimpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan.

c. Peran advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman

Advokat berperan dalam menjaga kekuasaan kehakiman. Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infra struktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman dan pengrusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

d. Peran advokat sebagai pekerja sosial

Advokat itu berperan dalam melakukan pekerjaan sosial. Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak

berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. Pasal 22 UU Advokat dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (*pro bono legal aid*).

Dalam sistem peradilan pidana masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas masing-masing. Polisi bertugas dibidang penyidikan, Kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, dan hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara. Sementara itu, advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat. Advokat dan hakim harus membantu sesama. Hakim akan lebih mudah bekerja dan menjalankan tugasnya sehari-hari apabila para advokat yang ada bermutu atau berkualitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Advokat dalam membela kliennya mempunyai suatu hubungan yang sangat khusus dan khas antara advokat dan kliennya itu. Hal ini diakibatkan karena adanya suatu hubungan *fiduciary* antara advokat dan kliennya itu. Dalam hubungan antara advokat dan kliennya, ada suatu kepercayaan yang penuh (*trust & confidence*) yang diberikan oleh klien kepada advokat tersebut. Hubungan *fiduciary*, yang menimbulkan tugas *fiduciary* (*fiduciary duties*) dari advokat ini merupakan ciri utama dan merupakan hal yang sangat penting bagi hubungan antara advokat dan kliennya. Yang dimaksud dengan tugas *fiduciary* dari seorang advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan *fiduciary* antara

advokat dan kliennya, yang menyebabkan advokat berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang advokat mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya, dan advokat haruslah setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya dengan derajat yang tinggi (*high degree*) dan tidak terbagi. Karena itu, advokat haruslah mengutamakan kepentingan kliennya melebihi dari kepentingan lain apa pun, termasuk melebihi kepentingan advokat itu sendiri. Jadi, kewajiban *fiduciary* dari advokat berhubungan bukan saja dengan kewajiban kepedulian (*duty of care*) yang mensyaratkan advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi mensyaratkan juga advokat untuk memiliki kewajiban berkepribadian, loyalitas, integritas, dan bersikap (*conduct*) yang bijaksana.³³

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selain tugas diatas, peran advokat dapat juga bersifat *futuristik*, yang

³³Munir Fuady, h. 18.

berarti bahwa advokat itu ikut memikirkan dan memberikan sumbangan dalam strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum adalah upaya dari kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dari pembentukan, penerapan dan pelembagaan dalam proses politik. Peran ini disebut sebagai *agent of development*, yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).³⁴

Dalam pembangunan hukum (*law development*), advokat berperan untuk mendorong dan mengarahkan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi. Dalam peran ini advokat harus membuka mata terhadap perkembangan di sekitarnya agar mereka dapat menyumbangkan pikirannya dalam pembangunan hukum.

Dalam pembaharuan hukum (*law reform*), advokat berperan untuk merombak dan memperbarui hukum yang tertulis sesuai dengan peradaban dan kemajuan kesadaran dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dalam peran ini advokat harus siap untuk melakukan penggantian atau amandemen undang-undang yang telah ada.

Dalam pembuatan dan penyusunan formulasi hukum (*law shaping*), advokat berperan untuk membuat dan menyusun formalisasi hukum dalam undang-undang dan hukum kebiasaan, secara tegas dan jelas untuk melindungi

³⁴V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 2.

hak asasi manusia dan keadilan sosial.³⁵

Berdasarkan hal diatas, advokat seharusnya dapat memberikan andil atau berbuat secara konket dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Hal ini terkait dengan jenis dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa advokat dapat memberikan sumbangan pikiran pembentukan undang- undang sebagai bagian dari hukum.

3. Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Apalagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan sama-sama memiliki monopoli atas keahlian di bidang hukum dan tentu saja tertutup bagi orang lain. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Profesional hukum memberikan pengayoman dan rasa keadilan. Akibatnya, selain masyarakat mengetahui adanya hukum dan dapat memanfaatkan hukum,

³⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 23.

mereka pun merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan begitu, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.³⁶

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan. Etika Profesi adalah peraturan yang ditujukan kepada perseorangan yang menyangkut pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. Pasal 322 KUHP, terdapat kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaan dianggap wajib menyimpan rahasia. Rahasia pekerjaan, jika wajib simpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apa pun dan bagaimana pun wajib menyimpan rahasianya, maka rahasia pekerjaan itu rahasia mutlak (absolut). Sebaliknya rahasia pekerjaan relatif (nisbi) jika wajib simpan rahasia pekerjaan itu harus membuka rahasianya, maka harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang dilindungi oleh rahasia itu. Untuk sampai pada kesimpulan membuka rahasia itu bukan pekerjaan mudah, karena si wajib simpan rahasia itu akan mempertimbangkan mana yang hendak dikorbankan, yakni kepentingan yang lebih besar daripada yang dilindunginya.³⁷

Setiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional

³⁶ Abdul Rahman, Diktat *Etika Profesi Hukum*, 2013, hlm.90.

³⁷ Ropaun Rambe, h. 41-42.

untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat dikarenakan setiap klien akan mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Aspek kepercayaan antara profesional dan klien ini menjadi pokok utama kajian Daryl Koehn dalam bukunya berjudul *The Ground of Professional Ethics*. Daryl menekankan janji publik seorang profesional yang sepihak, tak bersyarat, untuk melayani tujuan khusus dari kelompok orang tertentu memberi landasan pada otoritas kaum profesional yang mengesahkan kekuasaan mereka untuk memulai dan melaksanakan atau memberi hak atas tindakan yang mengubah kehidupan demi kepentingan klien.³⁸

Menurut Sumaryono pembentukan kode etik memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk:

a. Sebagai sarana kontrol social

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol

³⁸ Abdul Rahman, h. 43.

melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara advokat dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Ada dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang advokat, yaitu logika dan etika. Logika akan menuntun seorang advokat untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah, sedangkan etika akan menuntun seorang advokat sehingga ia akan mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu kedua hal tersebut harus dimiliki dan tidak dapat dipisahkan dari seorang advokat profesional. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, seta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat, tanpa melihat dari organisasi profesi mana yang ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.³⁹

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Berkaitan dengan kode etik setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi advokat, selalu memiliki kode etik yang dibuat sedemikian baiknya dan dijadikan sebagai landasan bertindak dan berperilaku bagi mereka dalam menjalankan profesi tersebut. Pada dasarnya kode etik itu akan dijadikan sebagai hukum dasar dalam setiap organisasi dan oleh karenanya akan berfungsi

³⁹ Kelik Pramudy dan Ananto Widiatmoko, h. 97.

sebagai pembebanan kewajiban kepada setiap anggotanya dan sekaligus pemberian perlindungan hukum.³⁰

Kode etik yang berlakukan oleh organisasi advokat sekarang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari UU Advokat. Kode etik advokat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi, untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi, serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

4. Fungsi Kode Etik Profesi Advokat

Sebenarnya kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perspektif ini pada umumnya berpengaruh pada sebagian advokat yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu penekanan utama pandangan ini terhadap kode etik adalah bagaimana norma-norma etis di dalamnya dapat memberikan pedoman kepada seorang advokat untuk memperjuangkan hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan potensi *survival* golongan masyarakat lemah di tengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme.

Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah untuk

menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Fungsi kode etik profesi advokat dapat dikelompokkan:

a. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya.

Seorang sarjana hukum setelah lulus ujian khusus keadvokatan maka dia lalu disumpah jabatan. Sumpah jabatan tersebut mencerminkan kepribadian advokat atau pengacara, kepribadian lainnya adalah advokat bersedia memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa membedakan kedudukan, warna kulit, suku, agama, keturunan, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Advokat menjalankan tugasnya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi terutama berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab.

Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasannya, derajat, martabat advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Advokat dalam menjalankan tugasnya harus bersikap dan sopan santun terhadap pejabat, penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun dia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar manapun juga.

b. Kode etik dalam hubungan advokat dan klien

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah tugas

utamanya seorang advokat. Karena di samping klien merupakan sumber penghasilan, profesi advokat juga merupakan jasa. Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan itu sangat penting. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang hanya karena klien merasa diabaikan kepentingannya apalagi advokat menyalahgunakan kepercayaan klien.

Advokat wajib mengurus kepentingan klien terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat dan khususnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan atau janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkara. Kode etik juga melarang menentukan syarat-syarat guna membatasi hak-hak kliennya untuk menyerahkan pengurusan perkaranya kepada advokat lainnya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya. Yang paling utama seorang advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhir hubungan advokat dan klien yang bersangkutan.

c. Kode etik dalam hubungan dengan rekan sejawat

Rekan sejawat adalah mereka yang bersama-sama menjalankan satu profesi yang sama dalam hal ini maksudnya adalah advokat lain, baik teman

dalam kantor maupun di luar kantor. Sebagai sesama rekan sejawat, advokat harus dengan kesejawatan berdasarkan sikap menghargai dan saling mempercayai, baik dalam tutur kata dan tulisan maupun tindakan harus berdasarkan sopan santun. Apabila terdapat perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar dalam urusan kepengacaraan asal diajukan dengan rasa hormat menghormati dan menghargai alasan satu dengan lainnya.

Keberatan atas perilaku rekan sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik, harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa. Seorang advokat juga tidak diperkenankan untuk menarik seorang klien dari rekan sejawat. Apabila klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih hanya dapat menerima perkara setelah mendapat keterangan dari advokat yang lain bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban terhadapnya termasuk honorarium.

d. Kode etik dalam bertindak menangani perkara

Surat menyurat antara rekan sejawat di dalam suatu perkara pada umumnya tidak dapat dibenarkan untuk ditunjukkan kepada hakim, kecuali dianggap perlu untuk menunjukkan itikad buruk dari pihak lawan. Surat-surat yang dibubuhi dengan catatan "*Sans Prejudice*" sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada hakim.

Ketika suatu perkara sedang berjalan di muka pengadilan, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama advokat pihak lawan dan dalam menyampaikan surat menyurat tersebut advokat pihak lawan diberikan tebusan.

Advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam maupun didalam sidang meskipun hanya bersifat “*ad-informandum*” atau keterangan tambahan, jika hal itu tidak diberitahukan terlebih dulu kepada advokat pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak, sehingga rekan sejawat tersebut dapat mempelajari catatan yang bersangkutan.

Jika advokat mengetahui bahwa seseorang mempunyai advokat, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara seseorang tertentu, hanya dapat dilakukan melalui advokat yang bersangkutan dan jika harus berbicara dengan klien dari seorang rekan sejawat tentang soal lain, maka ia tidak dibenarkan menyinggung atau mengkaitkan dengan perkara dalam mana klien tersebut dibantu oleh rekan sejawat yang bersangkutan.

- e. Kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum/ undang-undang, kekuasaan umum dan para pejabat pengadilan

Pada lafal sumpah jabatan advokat, terdapat kewajiban seorang advokat untuk menghormati kekuasaan umum, badan peradilan dan pejabat lainnya. Sikap atau tindakan jika tidak menghormati badan peradilan dan para pejabatnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melecehkan atau lazim dinamakan sebagai “*Contempt of Court*”.

Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1986 mengelompokkan perbuatan advokat yang dapat dianggap sebagai *Contempt of Court*:

- a. Secara lisan atau tertulis telah mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana;
- b. Memperlihatkan sikap yang tidak hormat terhadap majelis pengadilan atau

pejabat peradilan lainnya;

- c. Mengabaikan kepentingan dari si peminta bantuan hukum;
- d. Menggunakan kata-kata yang tidak pantas terhadap undang-undang atau pemerintah;
- e. Bertingkah laku dan berbuat yang tidak layak terhadap pihak-pihak yang berperkara atau pembelanya.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁴⁰

Kata “kejahatan” berasal dari kata latin *cerno*, yang berarti “saya memutuskan, saya memberi penilaian”. Berasal dari kata latin *crimen* yang berarti “tuduhan” atau “panggilan bahaya”. Kata Yunani Kuno *krima*, yang seasal dengan dengan kata latinnya, biasanya merujuk kepada kesalahan intelektual atau sebuah delik yang bertentangan dengan masyarakat, dan bukan sebuah kesalahan pribadi atau moral.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa, istilah kejahatan berasal dari kata

⁴⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h.125-126.

jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.⁴¹

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”⁴²

Sebuah definisi normatif memandang kejahatan sebagai “perilaku menyimpang” yang melanggar norma-norma dan standar kebiasaan yang berlaku yang menggambarkan bagaimana manusia harusnya bertindak secara normal.⁴³ Pendekatan ini menganggap realita-realita yang yang rumit mengelilingi konsep dari kejahatan dan mencari cara untuk memahami bagaimana perubahan kondisikondisi sosial, politik, psikologi, dan ekonomi yang bisa saja mempengaruhi perubahan definisi dari kejahatan dan bentuk hukum, penegakan hukum, dan respon pidana yang dibuat oleh masyarakat.

Kenyataan-kenyataan terstruktur tersebut, tetap lentur dan sering diperdebatkan, sebagai contoh: dengan berubahnya kebudayaan-kebudayaan dan pergeseran lingkungan politik, masyarakat dapat mengkriminalisasi atau meng-

⁴¹Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), h. 24.

⁴²Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito, 1984) h.45.

⁴³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 126.

dekriminalisasi beberapa perilaku, dimana efeknya secara langsung terasa pada rating statistik kejahatan, mempengaruhi alokasi dari sumber daya para penegak hukum dan mempengaruhi lagi opini publik secara umum.

Legislatif juga dapat mensahkan hukum (disebut *mala prohibita*) yang mendefinisikan kejahatan melawan norma-norma sosial. Hukum-hukum ini bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat: sebagai catatan dalam hukum perjudian, sebagai contoh, dan pelarangan atau dorongan untuk pertandingan duel dalam sejarah. Kejahatan lain disebut *mala in se*, dianggap sebagai perbuatan jahat di hampir semua masyarakat di dunia, contohnya ialah pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.

1. Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Profesi Advokat

Di dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 31, mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana yang diatur oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dengan pemidanaan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, Pasal tersebut tidak menjerat kepada seorang advokat, tetapi menjerat kepada seseorang yang berpura-pura menjadi advokat dan melakukan pekerjaan yang sama seperti advokat.

Dalam kenyataanya, seorang advokat juga bisa melakukan sebuah tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Tindak pidana yang bisa dilakukan seorang advokat ialah penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan surat, dan membuka rahasia, dalam profesi advokat delik-delik tersebut sangat mudah efeknya mempengaruhi seorang advokat sehingga mencederai kredibilitasnya sebagai seorang advokat.

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 372, yang mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratusrupiah.”⁴⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini ialah:

- a. Dengan sengaja memiliki.
- b. Memiliki suatu barang.
- c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
- e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Penipuan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 378, yang mengatur:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁴⁴Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 7.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 372.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴⁶

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut ialah:

- a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
- c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan- perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pemerasan adalah delik yang diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1), yang mengatur:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.”

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut adalah:

- a. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan kepada oranglain.
- b. Memaksa untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 378.

- c. Melakukan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Membuka rahasia adalah delik yang diatur pada Pasal 322 KUHP ayat (1), yang mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”⁴⁷

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah:

- a. Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.
- b. Membuka rahasia baik sekarang maupun yang dahulu.

Pemalsuan surat ialah delik yang diatur pada Pasal 263 ayat 1 KUHP, yang mengatur:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”⁴⁸

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah:

- a. Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- b. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk bukti.
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 322 ayat (1).

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 263 ayat (1).

tersebut seolah-olah isinya benar.

C. Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien

Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan berasal dari kata "authority" mempunyai arti mempunyai kekuasaan, "competency" mempunyai arti kecakapan; kemampuan; "right" mempunyai arti hak; adil; tepat; benar; baik; lurus; menegakkan, "property" mempunyai arti milik, punya, "truth" mempunyai arti kenyataan; keadilan, "privilege" mempunyai arti hak istimewa. Satjipto Rahardjo, hak mempunyai pengertian sempit dan luas. Hak dalam arti sempit yaitu:

1. Pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau
2. Tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya.⁴⁹

Pengertian dalam arti luas, yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan dan inisiatif.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hak itu memberi keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya, yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁵⁰

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 53-61.

⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 42-43.

Berdasarkan arti di atas maka dapat disimpulkan hak adalah kuasa atas sesuatu, hal yang benar, wewenang dan berkuasa. Hak manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri.

Jenis dan Macam hak manusia, hak pribadi (*personal/privat right*) yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Hak publik yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Hak Politik (*PoliticalRight*),
2. Hak Hukum (*Legal EqualityRight*),
3. Hak Ekonomi (*PropertyRigths*),
4. Hak Hak Sosial Budaya (*Social CultureRight*),
5. Peradilan (*Procedural Rights*).

Hak manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada, tidak bergantung dari persetujuan orang, merupakan bagian dari ekstensi manusia di dunia. Sedangkan hak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Adanya hak tersebut lebih kemudian dari pada hak manusia, dijamin dengan peraturan- peraturan, dan dapat dicabut oleh manusia yang memberikan

(penguasa/ negara).

Hak dan kewajiban merupakan wadah kedudukan dari peran (*role*), dimana kedudukan tertentu lazimnya memegang peranan/ kekuasaan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban merupakan tugas atau beban.

Tindakan pemegang peran/ kekuasaan ini harus dapat mengontrol keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual, dan analisis antara hukum dengan lingkungan sosial, moral/ etika, dan tujuan luhur pemegang peran/ kuasa.

Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. “*Expert Power*” adalah Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Kekuasaan atau wewenang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Kekuasaan atau kewenangan merupakan tugas bagi para pemelihara dan penegak keadilan atau para penegak hukum. Kekuasaan atau kewenangan di dalam hak dan kewajiban Advokat digunakan untuk menjamin kemandirian Advokat dalam menjalankan fungsi tugas pokok sebagai Advokat profesional.

Advokat sebagai manusia mempunyai kelemahan, khilaf, keliru maka

tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan, atau pelanggaran norma-norma yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak memenuhi peraturan yang ada, sehingga perlu dipulihkan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

Hak Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 14, 15, 16, 17, 18 (2), 19 (2). Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak karena undang-undang tersebut, merupakan kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan profesinya.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat, karena Advokat pada prinsipnya hanyalah pemegang kuasa/ agen dari kliennya. Ketidak identikkan antara Advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, dimana agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, dan selama agen masih menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang

⁵¹Penjelasan Pasal 14, Weinata Sairin, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat, h. 23.

didelegasikan kepadanya dan dilakukan secara profesional, maka Advokat tersebut tidak dapat menjadi tanggung gugat, tetapi pihak prinsipallah yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Prinsip tidak menyamakan Advokat dengan kliennya disebut juga dengan prinsip pemisahan profesional (*professional detachment principle*) atau prinsip nonakuntabilitas (*nonaccountability*), yang diakui dengan tegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Advokat sebagai salah satu profesional secara etika (yang dikuatkan oleh hukum) wajib juga menjaga rahasia yang didapat dari kliennya. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku mutlak disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Advokat tidak semata-mata merupakan “*alter ego*” dari kliennya tetapi merupakan pihak profesional yang bekerja sesuai dengan profesi.
2. Masih ada kepentingan lain yang mungkin lebih penting dari kepentingan melindungi rahasia antara klien dan Advokat.
3. Sistem peradilan pidana “*adversary*” di Indonesia tidak semata-mata memberlakukan sistem “*accusatorial*” (Advokat semata-mata berpihak kepada klien), tetapi juga berlaku sistem “*inquisitorial*” (Advokat berpihak pada keadilan).

Perlindungan hukum tentang kerahasiaan hubungan antara advokat dengan klien sesuai dengan doktrin perlindungan hasil kerja (*work product protection*). Doktrin perlindungan hasil kerja adalah perlindungan terhadap kerahasiaan antara Advokat dan kliennya bukan hanya rahasia yang

terbit dari hubungan langsung (konsultasi) antara Advokat dan kliennya, melainkan termasuk juga perlindungan kerahasiaan dari informasi yang didapatkan Advokat dari sumber lain yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan.

Advokat mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan, yakni tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya, atau dalam mendengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Advokat hanya memberikan kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Hak Imunitas adalah kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.

“Kebebasan” adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para Advokat ataupun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Kewajiban klien kepada Advokat antara lain:

1. Kewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan jujur atas perkaranya.
2. Kewajiban memenuhi dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dalam rangka melindungi hak-hak individual dari klien, yaitu melindungi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak dilakukan pemberatan diri sendiri (*selfincrimination*).
2. Hak untuk menerima bantuan hukum yang efektif dari Advokat.
3. Hak untuk tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak layak terhadap harta benda masyarakat.
4. Hak untuk mengontrol tidak berkembangnya informasi pribadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis memilih lokasi yang bertempat di Kota Makassar yang merupakan tempat dimana Asosiasi Advocat Indonesia Cabang Makassar berada.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni;

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya yaitu Asosiasi Advocat Indonesia Cabang Makassar untuk menjadi informan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁵² Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder
2. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden.⁵³
3. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁵⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan penulisan ini.

⁵²M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h. 114.

⁵³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

⁵⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), h. 65.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Asosiasi Advokat Indonesia

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) didirikan pada tanggal 27 Juli 1990, oleh dua ratusan anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang pada waktu itu sedang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Ikadin di Hotel Horison, Ancol, Jakarta Utara, yang kemudian menyatakan keluar dari Ikadin karena proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin periode 1990-1994 dinilai telah menyalahi Anggaran Dasar (AD) Ikadin. Ikadin adalah bentuk baru dari Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) setelah dikeroyok oleh organisasi-organisasi lain diantaranya BBH, LBH Trisula, LKBH Golkar, LBH MKGR, Pusbadhi, pada tahun 1986.

Menjelang acara pemilihan Ketua Umum DPP Ikadin tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara peserta Munas mengenai tata cara pemungutan suara. Di satu pihak, anggota yang dimotori mayoritas Ikadin cabang Jakarta yang diketuai Rudhy A. Lontoh, SH menginginkan pemungutan suara didasarkan pada ketentuan AD, yaitu one man one vote atau satu anggota satu suara, sementara di lain pihak menginginkan pemungutan suara dilakukan berdasarkan perwakilan melalui Dewan Pimpinan Cabang yang hadir, berdasarkan Raker tahun 1990.

Untuk menghindari pertentangan yang dapat menimbulkan pertentangan secara fisik di antara peserta Munas, maka peserta Munas berpegang teguh pada AD Ikadin, meninggalkan (walk out) acara Munas kemudian menyatakan keluar dari Ikadin.

Mereka yang sepaham mengadakan rapat di Gedung Serbaguna Putri Duyung Cottage di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, yang jaraknya kira-kira 500 meter dari hotel Horison. Secara spontan mereka sepakat berikrar mendirikan organisasi advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Mereka yang turut mendirikan AAI dari berbagai daerah yaitu DKI Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Manado, Pekanbaru, Bandar Lampung, Kupang, dan Pematang Siantar.

Suasana pada waktu itu begitu mengharukan, penuh rasa persatuan dan persaudaraan di antara mereka yang turut mendirikan AAI. Mereka beramai-ramai menandatangani ikrar di atas spanduk dan bersama-sama menyanyikan lagu “Kemesraan” (yang kemudian menjadi lagu kenangan yang selalu dinyanyikan pada setiap kesempatan yang diselenggarakan AAI di manapun berada, seperti Raker, Munas, Ulang Tahun AAI, dan lain sebagainya).

1. Periode 1990-1995

Pada periode awal, yaitu periode konsolidasi tahun 1990-1995 AAI dipimpin GANI DJEMAT, SH (sekarang sudah almarhum) sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI, didampingi Wakil Ketua Umum YAN APUL GIRLANG,SH dan Sekretaris Jenderal DENNY KAILIMANG,SH.

Ketika baru berdiri, AAI hanya memiliki 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) saja, yaitu di DKI Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Manado, Pekanbaru, Bandar Lampung, Kupang, dan Pematang Siantar. Setelah 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1995, jumlah DPC AAI di seluruh Indonesia menjadi sebanyak 31 DPC di Balikpapan, Banjarmasin, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

Bekasi, Bogor, DKI Jakarta, Denpasar, Gianyar, Kabanjahe, Kendari, Kupang, Lhokseumawe, Malang, Manado, Medan, Palu, Palembang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Samarinda, Semarang, Serang, Singaraja, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Ujung Pandang, dan Yogyakarta, dengan jumlah anggota seluruhnya 896 orang.

Dalam periode 1990-1995 ini, DPP AAI bersama Ikadin dan Ikatan Penasihat Hukum dan Pengacara Indonesia (IPHI) telah mencoba untuk memberlakukan satu kode etik profesi dengan melakukan unifikasi kode etik, yang dimaksudkan untuk mencegah berpindahnya advokat yang melanggar kode etik, dari satu organisasi ke organisasi lain, untuk menghindari sanksi kode etik dari organisasinya.

2. Periode 1995-2000

Selanjutnya pada periode kedua, yaitu 1995-2000, DPP AAI dipimpin YAN APUL GIRSANG,SH yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum, secara otomatis menjadi Ketua Umum, sesuai AD pada waktu, didampingi Wakil Ketua Umum HAKIM SIMAMORA,SH dan Sekretaris Jenderal EDDY BOEDHI PRASETIO,SH (meninggal dunia ditengah jabatannya) kemudian digantikan oleh Drs. HENSON,SH,MH.

Pada periode ini, tepatnya tanggal 8 April 1996, tiga organisasi AAI, Ikadin, dan IPHI sepakat mendirikan forum bersama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia disingkat FKAi yang berfungsi sebagai wadah komunikasi organisasi advokat dalam rangka merencanakan pembinaan profesi advokat dan RUU Advokat.

Pada periode ini pun AAI sudah mempunyai pemikiran, bahwa diperlukan adanya suatu Dewan Kehormatan Bersama AAI, Ikadin, dan IPHI, selanjutnya pemikiran ini terwujud dalam semangat pasal 27 ayat (1) UU No.18/2003 tentang Advokat, yaitu hanya ada satu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.

Pada periode 1995-2000 ini dikatakan sebagai periode pembinaan karena program kerja AAI dalam periode ini ditekankan kepada peningkatan kualitas anggota untuk meningkatkan profesi anggota, dengan menyelenggarakan berbagai seminar di Jakarta dan daerah, pendidikan dan pertemuan ilmiah secara rutin. Setelah, satu dasawarsa, jumlah anggota AAI di 31 DPC telah meningkat menjadi kira-kira 1500 orang.

3. Periode 2000-2010

Bersamaan dengan mulainya era Reformasi, DPP AAI periode 2000-2005, dipimpin DENNY KAILIMANG,SH,MH. Sebagai Ketua Umum yang ketiga, didampingi Wakil Ketua Umum THOMAS E.TAMPUBOLON,SH,MH dan Sekretaris Jenderal TEDDY SOEMANTRY,SH.

Seluruh program DPP AAI dalam periode 2000-2005 ini diarahkan sejalan dengan agenda reformasi hukum. Pada tanggal 11 Februari 2002, AAI bersama 6 organisasi advokat, pengacara, dan penasihat hukum, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal (HKHPM), membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)

menggantikan FKAI, dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia.

Tiga tugas pokok KKAI adalah:

- a. Menyusun dan mengesahkan kode etik bersama yang berlaku bagi 7 organisasi pengacara, advokat, dan penasihat hukum yang tergabung dalam KKAI.
- b. Turut sebagai pelaksana ujian pengacara praktek bersama Mahkamah Agung RI.
- c. Menggoalkan RUU Advokat menjadi UU Advokat.

Pada tanggal 23 Mei 2003, KKAI, di mana AAI termasuk di dalamnya, memprakarsai dan merampungkan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia, bagi mereka yang menjalankan profesi advokat. Kemudian kode etik tersebut dinyatakan dalam pasal 33 UU No.18/2003 tentang Advokat, mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat.

Tidak lepas dari peran AAI yang besar, KKAI berhasil menggoalkan pengesahan UU No.18/2003, setelah sebelumnya pada tanggal 17 April 2002 bersama Mahkamah Agung menyelenggarakan ujian pengacara praktek secara serentak di seluruh wilayah pengadilan tinggi, disusul kemudian pada tanggal 27 Agustus 2002 KKAI secara mandiri menyelenggarakan ujian kode etik di seluruh Indonesia.

Sampai dengan Desember 2004, berdasarkan hasil verifikasi KKAI dan perkembangan setelah verifikasi, jumlah anggota AAI yang telah mendaftar kembali adalah sebanyak 4292 orang dari 75 DPC AAI se Indonesia.

4. Periode 2010-2013

Sesuai dengan hasil MUNAS AAI ke 4 yang dilaksanakan pada Tanggal 11 – 14 November 2010 di GRAND BALI BEACH HOTEL SANUR telah terpilih sebagai pimpinan AAI adalah putra dari Almarhum Gani Djemat yang merupakan salah satu pendiri dan mantan Ketua AAI, yaitu Humphrey R. Djemat.

Sebagai pimpinan yang baru Humphrey berusaha untuk memperjuangkan dan mengembangkan citra AAI untuk Penguatan AAI untuk Kehormatan Profesi Advokat, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dengan moto “Membangun Advokat Pejuang” telah dibuktikan dengan:

- a. Adanya Nota Kepahaman dengan BPN2TKI untuk perlindungan hukum TKI,
- b. Adanya Nota Kepahaman dengan untuk melahirkan Advokat AAI sebagai advokat pejuang,
- c. Terpilihnya Humphrey sebagai Ketua Umum AAI di Satgas Perlindungan Hukum bagi WNI/TKI di luar negeri yang akan dihukum mati,
- d. Ditunjuk sebagai juru bicara Satgas.

Untuk ke dalam Humphrey telah melakukan langkah-langkah:

- a. Membangun Website AAI yang dapat dipergunakan sebagai sarana informasi baik kedalam AAI maupun dengan masyarakat luas,
- b. Membangun database Anggota AAI yang dapat diakses secara online,

- c. Menerbitkan Kartu Anggota AAI dengan mempergunakan Kartu anggota dengan teknologi RFID yang dapat dipergunakan secara luas, salah satunya adalah untuk absen dalam kegiatan AAI,
- d. Untuk menunjang mobilitas anggota AAI, telah terjalin kerjasama dengan beberapa penerbangan, travel, dan hotel dengan prioritas untuk mendapatkan harga khusus.

Diharapkan dengan kerjasama seluruh jajaran Kepengurusan 2010-2013 dan partisipasi anggota AAI akan dapat tercapai perjuangan AAI dalam membangun Advokat Pejuang di NKRI yang kita cintai.

B. Bentuk Kejahatan yang Dilakukan Advokat terhadap Kliennya

Mengawali pembahasan ini, penulis mengutip perkataan dari Eko S.Simen, S.H, selaku anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) bahwa:

“dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, seorang advokat itu sudah tidak dianggap suatu pekerjaan biasa atau profesi tetapi sudah dianggap sebagai penegak hukum”.¹

Jadi menurut beliau bahwa sebenarnya dulu itu orang yang praktek advokat atau pengacara hanya dianggap sebagai orang yang mengerti hukum yang melaksanakan suatu pekerjaan sebagai advokat, akan tetapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat, maka seorang advokat dianggap sebagai penegak hukum yang mempunyai kode etik tersendiri, yang harus dijunjung tinggi oleh advokat itu sendiri.

¹Eko S.Simen S.H, Anggota Asosiasi Advokat Indonesia, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2018.

Menjawab rumusan masalah ini, penulis melakukan wawancara dengan Dr. Titi S. Slametmela SH. MH selaku advokat di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dengan bahasa yang sederhana beliau mengatakan bahwa:

“bentuk kejahatan advokat terhadap kliennya macam-macam, paling banyak pasal 372 dan 378 hampir rata-rata pengacara begitu, kalau 338 tidak pernah justru dia membela”.²

Dari hasil wawancara tersebut Dr. Titi S. Slametmela SH. MH. hanya menyebutkan 2 (dua) pasal tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh advokat, yaitu:

1. Pasal 372

Tindak pidana dalam pasal 372 yang dimaksud oleh Dr. Titi S. Slametmela SH, MH. adalah tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, di dalam KUHP dikatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*):

a. Barangsiapa;

Unsur (*bestandeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

²Dr. Titi S. Slametmela, Anggota Asosiasi Advokat Indonesia, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2018.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

“Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari:

- 1) orang (natuurlijkepersoon);
- 2) badan hukum (rechtspersoon).”³

b. Dengan sengaja;

Unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “*dengan sengaja*” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menurut PAF. Lamintang:

“Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- 2) Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- 3) Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- 4) “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”⁴

Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur “*dengan sengaja (opzettelijk)*” yang terdapat dalam unsur tindak pidana

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69.

⁴(PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).

- c. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*).

Maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toe-eigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.⁵

- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*).

Untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut Adami Chazawi mengatakan:

“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya,

⁵P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155

sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”⁶

Terkait dengan tindak pidana penggelapan ini, Bapak Muh. Safri Tunru mengatakan:

ada juga advokat nakal kaitannya ialah mengambil barangnya klienya dalam bentuk mobil atau hal-hal sebagainya sekedar hanya untuk pinjam pakai, misalnya pak saya mau menagani perkara bapak kalau memang bapak tidak punya uang barter saja dulu mobil bapak, saya pakai untuk beberapa bulan atau beberapa tahun dan setelah perkaranya selesai dan perkara itu dia tidak bisa menangkan, harusnya mobil yang dipinjam tadi dikembalikan, akan tetapi oleh advokat mengambil mobil tersebut sebagai honorarium.⁷

2. Pasal 378

Tindak pidana dalam pasal 378 yang dimaksud Dr. Titi S.Slametmela SH.MH ini adalah tindak pidana penipuan. Dalam pasal 378 KUHP disebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana III*, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15.

⁷Muh. Safri Tunru, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBHM), wawancara oleh penulis, 25 Mei 2018.

c. Menggerakkan orang lain untuk/ supaya:

- 1) menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
- 2) memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
- 3) menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).

d. Dengan menggunakan cara:

- 1) memakai nama palsu atau martabat palsu,
- 2) tipu muslihat, ataupun
- 3) rangkaian kebohongan.

Pada kesempatan yang lain penulis juga mewawancarai bapak Muhammad Safri Tunru, dan beliau memberi contoh terkait dengan tindak pidana penipuan yang biasa dilakukan oleh advokat:

“Terkadang kita amati ada beberapa teman atau rekan sejawat rekan kita sesama advokat mengambil suatu tindakan dalam bentuk penipuan kaitannya ialah dia bisa mempertimbangkan bahwa kasus ini tidak bakalan menang akan tetapi oleh dia mengatakan bahwa ini bisa kita tangani ini bahkan dia memberikan janji bahwa ini bisa kita menangkan atau hal-hal sebagainya”.⁸

Hal yang sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muhammad Safri Tunru tersebut secara tidak langsung, menjanjikan kemenangan suatu perkara itu sudah dikatakan melanggar kode etik dan dia juga sudah melanggar dari bagian sumpah ketika dia diangkat sebagai advokat karena ketika seorang ingin menjadi advokat, sebelumnya harus diambil sumpahnya dan diperkenalkan adanya kode etik salah satunya tidak memberikan janji kepada klien untuk memenangkan sesuatu perkara. Terlebih lagi ketika seorang sudah menjanjikan mampu memenangkan

⁸Muh. Safri Tunru, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBHM), wawancara oleh penulis, 25 Mei 2018.

perkara, namun ia tahu bahwa sebetulnya perkara tersebut tidak bisa ia menangkan, maka ia pun telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana penipuan.

C. Upaya A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) untuk Menertibkan Anggotannya agar Tidak Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Muh. Safri Tunru, beliau mengatakan:

“yang membuat gaduh suasana profesi advokat ini ada dua permasalahan yang pertama ialah banyaknya organisasi advokat dan kedua sulitnya untuk mengakomodir advokat-advokat yang nakal”.⁹

Banyaknya organisasi advokat dikarenakan adanya aturan Mahkamah Agung, semua profesi advokat ketika dia mempunyai badan hukum lengkap dengan semua persyaratan dan lain-lain sebagainya maka mereka sudah bisa merekrut anggota sendiri dan di akui oleh Pengadilan.

Lebih lanjut bapak Muh. Safri Tunru mengatakan:

“dengan banyaknya profesi advokat maka sangat sulit untuk mengakomodir advokat-advokat yang nakal misalnya saya dari advokat peradin ketika saya melakukan tindakan kejahatan atau diduga melakukan tindak pidana ancaman 5 tahun supaya saya tidak terjerat hukuman kalau misalnya saya mau di sidang kode etik saya kan tinggal pindah ke organisasi lain ketika saya pindah ke peradi maka saya kan tidak bisa sidang kode etik pelanggaran itu, hal ini lah yang sulit di di hadapi oleh profesi advokat dalam hal melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya”,

⁹Muh. Safri Tunru, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBHM), wawancara oleh penulis, 25 Mei 2018.

Hal ini merupakan cela yang bisa saja dimanfaatkan oleh para advokat yang melakukan pelanggaran. Beriring dengan pendapatnya yang mengungkapkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap advokat-advokat nakal, bapak muh. Safri juga mengeluarkan pendapatnya yang berisi saran untuk menangani hal tersebut bahwa:

“makanya saran kita beberapa teman kita atau rekan sejawat ialah sebaiknya organisasi dari profesi Peradi, Peradin, KAI, AAI, harus masing-masing ada perwakilan, perwakilan itulah yang mencoba membuat lembaga pengawas kalau di kepolisian ada namanya kompolnas, yang di kejaksaan ada yang namanya komisi kejaksaan, untuk hakim ada namanya komisi yudisial, maka harapan kita ialah perwakilan-perwakilan setiap profesi advokat itu membentuk namanya lembaga pengawas untuk menyidangkan dalam bentuk sidang kode etik advokat-advokat yang nakal itu untuk mengantisipasi supaya jangan terlalu banyak masalah di lingkungan masyarakat kita”.¹⁰

Dengan demikian, ada pun yang menjadi upaya AAI untuk menertibkan anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran kode etik ialah menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan kode etik advokat indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan pelanggaran kode etik, dan dewan kehormatan harus berani menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggaran kode etik sehingga bisa ,menjadi efek jera bagi advokat lainnya.

¹⁰Muh. Safri Tunru, Anggota Asosiasi Advokat Indonesia, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya, kebanyakan tindak pidana yang ada dalam pasal 372 yaitu tindak pidana penggelapan dan pasal 378 yaitu tindak pidana penipuan, sebagai contoh bentuk kejahatan tindak pidana penggelapan, yaitu ketika ada seorang advokat melakukan penggelapan uang perkara yang di berikan oleh kliennya untuk membayar uang perkara, dan dilakukan oleh advokat terhadap kliennya dengan alasan dorongan dari keluarga, teman dan lain-lain sebagainya.
2. Upaya yang dilakukan dalam hal menangani tindak pidana advokat terhadap kliennya adalah dengan cara membentuk suatu dewan kehormatan advokat yang anggotanya terdiri dari masing-masing perwakilan organisasi advokat dan menyelenggarakan seminar untuk mensosialisasikan kode etik advokat indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan pelanggaran kode etik, dan dewan kehormatan harus berani menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggaran kode etik sehingga bisa ,menjadi efek jera bagi advokat lainnya.

B. Saran

Pada akhir tulisan ini penulis mencoba memberi saran, yaitu:

1. Agar tidak terjadi pelanggaran kode etik advokat tentunya dewan perwakilan harus pro-aktif dalam menanggulangi persoalan pelanggaran yang terjadi, kurangnya aduan ke dewan perwakilan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik cumin pengadunya tidak tahu harus mengadukan kemana.
2. Keberanian dewan kehormatan dalam menjatuhkan sanksi juga merupakan faktor yang membantu agar banyak advokat mematuhi kode etik advokat Indonesia, selama ini tidak pernah ada penjatuhan sanksi yang berat dan berdampak signifikan dalam penegakan kode etik ini juga menjadi penghambat agar kode etik dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- B, Simanjuntak dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Fuady, Dr. Munir *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandng: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lawrence, Friedman. *American Law an Introdction*, (Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*. Cet. I: Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Sarmadi, H. A. Sukris. *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Jakarta: Bina Cipta, 2009.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokatdan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Simanjuntak.B.dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984)
- Sumaryono, E. *FilsafatHukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Sumaryono, E. *ProfesiAdvokat*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1980.

Taufiq, Muhammad dan Moegono, 2007, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat "profesi Sampah"*, Surakarta: Penerbit JP Books.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2006.

Widiyanti, Ninik dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara 1987.

W. Purwadarminta, J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat dan Kode Etik Advocat*,

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muh. Ibnu Tupail Iskandar, lahir di Bantaeng 20 Mei 1996, anak dari pasangan Bapak Emran Iskandar, dan ibu Marselina anak pertama tiga bersaudara. Penulis menghabiskan masa kecilnya di Kota Bantaeng, Kabupaten bantaeng, kota kecil di daerah Sulawesi Selatan yang di Penulis mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar SD. 20 Tala - Tala Kabupaten Bantaeng pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008, setelah tamat dari sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP 3 Bisappu 2008-2011. Tamat dari bangku SMP, penulis kembali melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Bantaeng 2011-2014. maka penulis memberanikan diri merantau ke Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014, mengambil jurusan Peradilan Agama di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018 dengan kurun waktu 3 tahun 11 bulan 6 hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R